

## **Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian**

### **12 Mei 1998**

Peristiwa Trisakti. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut perubahan akan pemerintahan yang demokratis dan reformasi total. Empat orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie, tewas ditembak aparat. Korban luka-luka sebanyak 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

### **8 – 14 November 1998**

Peristiwa Semanggi I. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.

### **24 September 1999**

Peristiwa Semanggi II. Mahasiswa berdemonstrasi merespon rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat otoriter tak jauh dari UU Subversif. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang. Represifitas aparat juga diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, tiga orang mahasiswa diantaranya, yaitu Yusuf Rizal (mahasiswa Bandar Lampung) dan Saidatul Fitira (mahasiswa di Lampung) serta Meyer Ardiansah (mahasiswa IBA Palembang).

---

### **6-Juni-1998**

Pengadilan militer untuk kasus Trisakti dimulai di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Heryanto dan Letda Polisi Pariyo.

### **10-Februari-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Puspom TNI- Danpuspom tidak bisa menerima, dengan alasan sedang tidak ada ditempat.

### **15-Februari-1999**

Puspom TNI mengeluarkan keterangan pers berkenaan dengan kasus Semanggi I, yaitu bahwa mahasiswa tidak bersedia memberikan kesaksian. Peluru yang sudah diuji balistik belum ada yang identik dengan senjata aparat jenis SS-1 dan M-16. Belum diketahui

siapa pelaku penembakan baik dari ciri-ciri maupun tanda-tandanya. PANGAB menyatakan bahwa ada peluru yang bukan standar ABRI.

#### **4-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke F-ABRI DPR RI, yang diterima Mayjen TNI Siregar, Laksad dalam sinuraya, Kol. Djawijaya (kowad). F-ABRI menyatakan desakan pengusutan kasus Semanggi akan disampaikan kepada pimpinan fraksi ABRI DPR RI

#### **15-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan dan Soegiri. Komnas HAM menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus semanggi.

#### **29-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya, Danpomdam Jaya tidak bersedia menerima dengan alasan kontraS bukan lembaga pengacara. hanya diterima Kep.Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor CPM Ir. YW. Wempi Hapan, MSc, eng. yang menyampaikan bahwa kasus Semanggi belum bisa diungkap karena keterangan saksi baru dari pihak tentara, sedangkan keterangan dari pihak sipil belum memadai. Untuk itu keluarga korban diminta bersabar menunggu penjelasan Panglima TNI

#### **31-Maret-1999**

Enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2-10 bulan.

#### **Mei-1999**

Uji balistik di Kanada. Diketahui bahwa jenis senjata yang ditembakkan proyektil peluru dalam peristiwa penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi 1998 berasal dari senjata yang dimiliki TNI.

#### **14-Mei-1999**

Aksi long march ke Istana Merdeka untuk kasus Semanggi I, menuntut penuntasan kasus dan tanggungjawab pemerintah

#### **10-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Dephankam. Delegasi hanya diterima oleh Kasubag Audio Visual Humas, letkol Oma Rubama. Delegasi memilih untuk tidak mengadakan dialog karena Menhankam tidak mau menerima secara langsung.

#### **22-Juli-1999**

Aksi kasus Semanggi I ke Puspom TNI, menuntut Kapuspom melakukan penyelidikan.

**16-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke F-PPP DPR-RI. Diterima oleh pimpinan fraksi PPP, Zarkasih Nur. PPP menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus TSS.

**29-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya. Danpomdam tidak bisa menerima dengan alasan mengikuti rapat di Polda, untuk mempersiapkan acara peringatan 17 Agustus. Kep. Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor (CPM) Ir. YW. Wenpi Hapan, Msc, menyatakan kasus Semanggi belum bisa disidangkan karena alat bukti belum cukup. Selanjutnya keluarga korban diusir keluar gedung/balai pertemuan.

**4-Agustus-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke DPP-PKB diterima ketua umum DPP-PKB, Matori Abd Jalil. PKB menyatakan akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**5-Agustus-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya diterima Danpomdam Jaya, Kol (CPM) Mungkono. Danpomdam Jaya menyatakan peluru yang mengenai para korban sudah dilakukan uji balistik, tetapi tidak bisa lagi diidentifikasi karena mantel-peluru tersebut sudah rusak.

**6-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PAN diterima Sekjen DPP PAN, Faisal Basri. PAN berjanji akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**16-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PDI Perjuangan diterima Dimiyati Hartono. PDIP menjanjikan akan memperjuangkan pengusutan kasus semanggi.

**19-Agustus-1999**

Audiensi ke Kantor perwakilan PBB untuk HAM (UNHCR) di Jakarta, diterima kepala kantor UNHCR Sam S. Souryal. UNHCR berjanji akan mengirim rekomendasi penuntasan kasus Semanggi ke instansi terkait, dan mendesak pemerintah RI untuk mengusut kasus Semanggi.

**15-September-1999**

Aksi damai kasus Semanggi I ke Dephankam, dihambat oleh aparat di Jl Thamrin, dekat Mc. Donald-pasar Sarinah. Aparat merepresi massa aksi, dengan penganiayaan dan penembakan dengan peluru karet.

**13-Oktober-1999**

Audiensi ke fraksi Utusan Golongan MPR RI diterima ketua fraksi utusan golongan MPR RI Marzuki Usman, Ny, Gedong Oka, Djoko Wijono. Mereka berjanji akan berusaha mengangkat kasus Semanggi dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999.

### **15 Oktober-1999**

Panglima TNI memerintahkan TNI untuk menuntaskan kasus TSS.

### **25-November-1999**

Siaran pers bersama, mendesak Presiden RI, Bapak K.H. Abdurrahman Wahid untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan semua kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa. Secara khusus, mendesak dibentuknya pengadilan HAM atau Pansus DPR bagi kasus-kasus kekerasan mahasiswa dan segera memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan tersebut.

### **2-Desember-1999**

Rektor Usakti membentuk Tim Penuntasan Kasus 12 Mei melalui surat keputusan No.343/USAKTI/SKR/XII/1999. dengan tujuan menyeret para pelaku ke Pengadilan.

Tim menulis surat ke Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Laksmana Widodo A.S yang intinya mendesak Puspom TNI melanjutkan seluruh proses hukum pengungkapan kasus Trisakti.

### **28-Desember-1999**

Kasum TNI Laksamana Muda TNI Yoost F. Mengko menjawab surat Tim Trisakti, menjelaskan bahwa Panglima TNI tidak tinggal diam dan bahwa sejak 15 Oktober 1999 telah memerintahkan TNI untuk menuntaskan kasus TSS

### **31-Desember-1999**

Kasum TNI letjen. Suaidi Marabessy menulis surat kepada Kapolri No. B/2678-01/03/06/SRT meminta Kapolri mendukung kelancaran penyelesaian kasus, dengan memerintahkan kepada Kapuslabor Mabes TNI agar menyerahkan anak peluru pembeding kepada penyidik Puspom TNI. Dan meminjamkan alat mikroskop pembeding. dengan adanya surat tersebut, Kapolri baru mau menyerahkan peluru pembeding ke Puspom TNI

### **17-Februari-2000**

Penyerahan barang bukti di Puslabfor disaksikan Kol. CPM Hendarji dan para anggota tim. Jada selisih jumlah barang bukti, jumlah tertulis 46 buah, namun yang ada hanya 40 buah. Setelah dibuatkan berita acara hilang barang bukti dan ancaman praperadilan . tidak lama kemudian barang bukti 6 buah peluru pembeding yang semula “hilang” ada di tempatnya kembali.

Pihak Polri masih tidak percaya sepenuhnya kepada penyidik, mereka meminta ikut ke Belfast dan tidak menyerahkan saja sepenuhnya ke penyidik.

### **20-Februari-2000**

Barang bukti penembakan (peluru dan senjata) dibawa ke Belfast (Inggris) untuk diuji oleh lembaga kepolisian Inggris yang memiliki Laboratorium IBIS yang menggunakan alat *Leica DMC Comparison Microscope*

### **22-Februari-2000**

Audiensi ke Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan, BN Marbun. Keduanya menyatakan usulan pembentukan KPP HAM kasus Semanggi akan dibicarakan pada rapat pleno komnas HAM (29/2)

### **24-Februari- 2000**

Garry Elliott Montgomery selaku *Forensic Scientist* melaporkan hasil uji balistik di Belfast. Pada intinya dari isi dapat dipastikan bahwa anak peluru yang dijadikan barang bukti ditembakkan dari senjata larang panjang SS1 dan Steyr.

### **7-Maret-2000**

Pertemuan Tim 12 Mei dengan Kapolri, meminta Kapolri membantu penuntasan kasus Trisakti dan tidak melindungi anak buahnya yang terlibat. Kapolri berjanji akan memenuhi permintaan tim. Aksi damai ke Istana Merdeka untuk menjumpai Presiden, tetapi tidak berhasil.

### **13-Maret-2000**

Pertemuan tim 12 Mei dengan Danpuspom Mayjen. TNI Djasri Marin. Disampaikan tentang kendala yang dihadapi Puspom TNI, berkenaan dengan sikap Polri yang setengah hati terhadap Puspom TNI

### **14-Maret-2000**

Aksi damai ke Istana Merdeka untuk menjumpai Presiden, namun pihak istana tidak bersedia menerima.

### **3-April-2000**

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-PKB, F-PPP, dan F-Reformasi guna meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Arthur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

### **10-April-2000**

Puspom TNI menyatakan bahwa perkara penembakan mahasiswa Trisakti sudah akan bisa disidangkan sebelum tanggal 12 Mei 2000

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-TNI meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Arthur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

### **19-April-2000**

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-PDIP, F-Golkar, diterima Akbar Tanjung untuk meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Atrhur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

### **4-Mei-2000**

Audiensi ke fraksi PDI-P diterima Paulus Widiyanto, Panda Nababan, Firman Jaya Deli. F-PDI-P berjanji akan meminta Danpuspom TNI datang ke DPR untuk menjelaskan perkembangan kasus Semanggi. Jika TNI tidak memenuhi undangan, fraksi PDI-P akan menandatangani Puspom TNI. akan memfasilitasi pertemuan antara panglima TNI dan Danpuspom TNI dengan keluarga korban (Trisakti dan Semanggi). Dan PDI-P akan berupaya kasus semanggi diangkat dalam rapat-rapat di DPR.

### **4- Mei-2000**

Tim 12 Mei mengadakan seminar tentang Pusat Laboratorium forensik yang mandiri dan Obyektif, perbandingan dengan laboratorium forensik di luar negeri.

### **13-Juni-2000**

Monitoring rapat kerja komisi I dan II DPR RI dengan Kapolri dan Panglima TNI DPR RI. Panda nababan, Teras Narang, dan Firman Jaya Daeli Fraksi PDI-P mengangkat kasus Semanggi. Dan Polri menyatakan sudah menyelesaikan tugasnya dalam memberikan bantuan tehnik penyidikan kepada Pomdam Jaya, sehingga penangananan kasus semanggi I dan II kini menjadi tanggung jawab Puspom/Pomdam Jaya

### **16-Juni-2000**

Audiensi ke Polda Metro Jaya diterima Kaditserse Polda Metro Jaya, Kol. Pol. Alex Bambang Riatmojo. Disampaikan bahwa: 1. laporan hasil penyidikan kasus semanggi II sudah dilaporkan Polri ke Pomdam Jaya, dan siapa nama penembaknya sudah dapat diketahui dari hasil penyidikan tersebut. Sedangkan perkembangan kasus Semanggi I tidak banyak diketahui karena ditangani Kaditserse yang terdahulu.

### **6-Juli-2000**

Audiensi keFraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI diterima Drs. Ali Masykur Musa, (Wakil ketua fraksi PKB), dan Drs Susono Yusuf (Wakil sekretaris). F PKB menyatakan akan segera menulis surat kepada Panglima TNI, dan Puspom TNI serta Kapolri untuk menanyakan perkembangan pengusutan kasus semanggi I dan II.

### **13-Juli-2000**

Audiensi Ketua MPR RI diiterima Dr Amin Rais. Ketua MPR berjanji akan bersama-sama dengan keluarga korban peristiwa semanggi I dan II, dan peristiwa Mei 98, akan mendatangi pihak-pihak yang terkait ; Presiden, Menhankam, dan Panglima TNI.

### **6-Februari 2001**

Dalam RDPU DPR RI, Pansus mengundang korban Trisakti, Semanggi I untuk memberikan masukan yang akan dipakai untuk materi pembahasan TSS di Pansus.

### **9-Juli-2001**

Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutardjo Surjoguritno. Isi laporan : 1. F-PDI P, F PDKB, F PKB (3 fraksi ) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat. Sedangkan F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

### **13-Juli-2001**

Audiensi danaksi ke Komnas HAM di terima Mohammad Salim dan Soegiri. Menuntut kesungguhan Komnas HAM dalam melakukan penuntasan kasus TSS.

### **18-Juli-2001**

Audiensi ke Istana Presiden, diterima Presiden Abdul Rahman Wahid. Presiden menyatakan Pernyataan: 1.Status pengadilan tragedi Trisakti, Semanggi I dan II seharusnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung, sehingga penuntasan kasus TSS bisa diteruskan sampai ke proses banding di pengadilan tinggi, dan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. 2.harus dipisahkan antara TNI/Polri sebagai institusi dengan dan pribadi-pribadi yang bersalah. 3. Presiden berjanji akan mempelajari kasus Trisakti, semanggi I dan II bersama anggota kabinet dan Jaksa Agung. 4. keluarga korban diharapkan untuk tidak berhenti memperjuangkan keadilan.

### **30 Juli 2001**

KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II dibentuk oleh Komnas HAM

### **4-September- 2001**

Audiensi ke Mahkamah Agung diterima M Taufiq (Wakil Ket MA), Laica Marzuki (Hakim Agung), Said Harahap, Abdul Rahman Saleh, Mugihardjo (Direktur Pidana), Girman Hudiarjo (ket Muda Urusan Militer. Dinyatakan bahwa rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan II DPR RI tidak berketentuan hukum. Karena Rokemendasi bukan bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa di uji oleh MA.

### **7-September-2001**

Audiensi ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM Merespon rekomendasi pansus Trisakti, semanggi I dan II DPR RI yang menyatakan tidak ada pelanggaran M berat pada kasus TSS.

### **5 Oktober 2001**

Temuan awal KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Pelanggaran HAM terjadi berupa pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan seksual.

### **13-November-2001**

Audiensin ke Komnas HAM, diterima pimpinan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II: Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, menanyakan perkembangan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

### **Januari 2002**

Sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dihukum 3-6 tahun penjara.

### **23-Januari-2002**

Audiensi ke Kantor Perwakilan PBB meminta dorongan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan mensosialisasikan kasus T di tingkat Internasional. Perwakilan PBB di Jakarta menyatakan bahwa pernyataan sikap AKKRA (aliansi korban kekerasan Negara) akan dikirim ke PBB.

### **13 Februari 2002**

Audiensi ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat, diterima Rudy As'ad (Wakil Ketua) dan Andi Samsam Nganro (Humas), meminta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil keputusan sesuai hukum dan rasa keadilan, serta tidak mudah patah ditengah jalan karena tekanan TNI/ Polri, terkait tindakan Mabes TNI/Polri telah mengajukan surat keberatan atas permohonan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II untuk melakukan upaya pemanggilan paksa para jendral. Dan pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menghadapi kesulitan dalam memutuskan permintaan bantuan KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II, karena ketua pengadilan sedang melakukan ibadah Haji. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rusky As'ad meminta KPP Trisakti Semanggi melengkapi berkas pemanggilan sub poena (pemanggilan paksa) terhadap sejumlah jenderal dan perwira TNI/Polri yang menolak panggilan KPP HAM.

### **20-Februari-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diiterima Djoko Sugianto (ketua Komnas HAM). Joko menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan tindakan proses hukum dengan meminta bantuan ke kejakung untuk mendapatkan dokumen dari TNI/Polri dan pengadilan negeri jakarta pusat untuk memanggil paksa para jendral TNI/Polri

### **21-Februari-2002**

Mengajukan somasi kepada presiden, karena presiden tidak mendukung pengusutan dan penyelesaian kasus Trisakti, semanggi I dan II.

Aktivis mahasiswa 98 mengadakan konfrensi pers didepan keluarga korban untuk klarifikasi adanya oknum-oknum mahasiswa yang mencatut nama dan memalsukan tanda tangan beberapa mahasiswa dengan mengatasnamakan gerakan eksponen 98 yang menentang dibentuknya KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui keabsahan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II yang selama ini menjadi pro kontra.

### **27 Februari 2002**

Rapat Pleno Komnas HAM menyetujui perpanjangan masa tugas KPP HAM TSS yang berakhir 28 Februari 2002, selama sebulan. Bila dalam tenggat waktu perpanjangan itu KPP HAM tidak juga mampu memanggil para jenderal TNI/Polri untuk bersaksi, Komnas HAM akan mengambil alih seluruh tugas KPP.

### **11-Maret-2002**

Audiensi ke Ke Komnas HAM diterima pimpinan KPP HAM TSS Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, disampaikan bahwa pemanggilan terhadap Jendral Purn Wiranto untuk memberikan keterangan kepada KPP, jam 10.00, tetapi s.d. jam 11.30 Wiranto belum juga memenuhi undangan.

Keluarga korban bersilaturahmi ke rumah jend. Wiranto sesuai alamat surat pemanggilan KPP HAM untuk mengingatkan bahwa Wiranto ditunggu kedatangannya di komnas HAM. Surat dan setangkai bunga untuk Wiranto disampaikan melalui Suharlan (ajudan)

### **21 Maret 2002**

KPP HAM TSS menyimpulkan 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil.

### **22 April 2002**

Rapat pleno Komnas HAM memutuskan laporan akhir KPP HAM TSS ke Kejaksaan Agung.

### **21 Mei 2002**

Pengembalian berkas pertama. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan 1). BAP Komnas HAM atas tiga kasus hanya berupa transkrip wawancara. 2) Mempertanyakan sumpah jabatan penyelidik.

Komnas HAM menyatakan : 1). Pengakuan keterangan hanya berupa wawancara karena fungsi penyelidikan memang tidak mewajibkan untuk membuat berita acara seperti yang dibuat di kepolisian. 2) Fungsi penyelidik KPP HAM sama dengan penyelidik polisi sehingga tidak harus disumpah. Tugas KPP HAM adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan.

### **23 Mei 2002**

Komnas HAM mengembalikan berkas sesuai pasal 20 ayat 3 UU tentang Pengadilan HAM. Berkas diterima oleh Sekretariat HAM Ad hoc Kejaksaan Agung yang diterima oleh Umar Bawazier, Barman Zahir dan Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

### **12-September-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diterima Garuda Nusantara, Djuwaldi dan Hasto Atmojo. Komnas menyatakan bahwa posisi Komnas berhadapan dengan DPR dan Kejaksaan Agung yang tidak mendukung hasil penyelidikan kasus trisakti, semanggi I dan II.

### **13 Agustus 2002**

Pengembalian berkas kedua. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM melalui surat bernomor R-177/1/HAM/08/2002 dengan alasan belum lengkapnya berkas serta : 1). Penyelidik yang tidak disumpah. 2). Telah adanya pengadilan militer kasus Trisakti dan Semanggi II.

### **3 September 2002**

Komnas HAM memutuskan untuk tidak memperbaiki kembali semua berkas yang dikembalikan, dengan alasan : 1). Dalam UU Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyelidik. 2). Penyelidik Jaksa Agung harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak panggilan Komnas HAM. 3. Kasus ini bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM sesuai wewenangnya.

### **13 September 2003**

Pengembalian berkas ketiga. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM.

### **22 September 2002**

Menurut Kapuspenkum Barman Zahir, Kejaksaan Agung akan meneliti kembali dan memperdalam hasil penyelidikan KPP HAM TSS. Penyempurnaan diketuai oleh BR Pangaribuan dan akan melibatkan tim KPP HAM.

### **30 Oktober 2002**

Pengembalian berkas keempat. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM bernomor R751/F/FE.2/10/2002 yang berisi penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Surat ditandatangani oleh Jam Pidsus, Haryadi Widyasa.

### **20-Desember -2002**

Orasi di Tugu Proklamasi, dan testimoni penembakan Irmawan (wawan) dalam kegiatan peringatan hari HAM.

### **11 Maret 2003**

Kejaksaan Agung menolak melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti Semanggi I dan II karena tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali (prinsip ne bis in idem). BR Pangaribuan, Ketua Satgas Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa prinsip ne bis in idem tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utamanya belum diadili.

### **14 Maret 2003**

Siaran pers bersama, merespon sikap Jaksa Agung yang menolak menyidik kasus Trisakti – Semanggi. Keluarga korban menganggap hal ini merupakan ancaman serius bagi penegakan HAM.

### **19 Maret 2003**

Komnas HAM mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, meminta pimpinan DPR meninjau kembali putusan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Tim penyelidik Komnas HAM menemukan adanya sejumlah bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran HAM berat.

### **8 Juni 2003**

Dimulainya Mahkamah Militer untuk kasus Semanggi II. Mahkamah Militer mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, anggota Yon Armed Kostrad yang menjadi terdakwa penembak Yap Yun Hap. Ia didakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan tewasnya orang lain.

### **19 Juni 2003**

Siaran Pers bersama Korban Trisakti-Semanggi I dan II, AKKRA, TPK 12 Mei, Kompak, Truk dan KontraS menuntut agar (1). Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II, (2). DPR RI untuk mencabut rekomendasi pansus Trisakti, Semanggi I dan II, (3). Menolak pengadilan militer atas peristiwa Semanggi II.

### **8 Juli 2003**

Audiensi dengan Pimpinan DPR. Diterima oleh Ir Akbar Tanjung, Akil Muhtar, Baharudin Aritonang dan Agung Gunanjar. DPR menyatakan akan mengadakan rapat kerja gabungan antara komisi III-Kejaksaan Agung- Komnas HAM untuk membahas masalah rekomendasi DPR tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

### **11 September 2003**

Audiensi dengan pihak Komnas HAM, yang diwakili oleh Zoemrotin. Ia bersedia untuk menanyakan kelanjutan kerja DPR dalam meninjau ulang rekomendasinya.

### **27 Oktober 2003**

Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim G Nusantara bertemu dengan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung. Komnas HAM meminta DPR untuk mengkaji putusan kasus Trisakti Semanggi I dan II. DPR bersedia mengkaji ulang putusannya. Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung, BR. Pangaribuan menyambut baik hal ini dan siap melakukan penyidikan jika DPR telah mencabut rekomendasi Pansus 2001.

### **19 November 2003**

Diundang pansus RUU KKR DPR RI untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Korban Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Mei 98, Talangsari, IKOHI, Tanjung Priok, 65 menolak RUU KKR, karena : (1). Substansi

RUU mengarah kepada pemberian impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM, (2). Anggota DPR RI periode 1999-2004 adalah mesin politik orde baru yang tidak mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

#### **12 Januari 2004**

Rapat pimpinan DPR RI memutuskan untuk mengkaji dan mempelajari permintaan Ketua Komnas HAM. Pimpinan DPR meminta Komisi II untuk memeriksa kembali status hukum kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

#### **14 Januari 2004**

DPR RI memberikan surat kepada Komnas HAM yang menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menugaskan Komisi II untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut surat Komnas HAM berkenaan dengan penyelesaian kasus Trisakti Semanggi I dan II.

#### **5 Februari 2004**

Siaran pers bersama, mendesak DPR untuk segera memberikan rekomendasi baru untuk terhadap kasus TSS sebagai bentuk tanggung jawab moralnya untuk mendukung *good governance* aparaturnya penegak hukum dan supremasi hukum itu sendiri serta Kejaksaan Agung juga harus bersikap pro aktif mendesak DPR untuk mengubah rekomendasinya.

#### **14 Maret 2004**

Kejaksaan Agung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengatakan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat.

#### **1-15 April 2004**

Tim Penuntasan Kasus 12 Mei 1998 mengirimkan wakilnya untuk mensosialisasikan kasus pada sidang Tahunan PBB. Terjadi kesepakatan dengan *Special Rapporteur* PBB untuk memberikan peringatan terhadap Pemerintah Indonesia, yang direalisasikan kemudian dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tekanan beberapa lembaga dan negara terhadap Indonesia.

#### **12 Mei 2004**

Peringatan peristiwa Trisakti. Aksi ke Istana negara dan DPR.

#### **25 Mei 2004**

Aksi mahasiswa Trisakti dan keluarga korban menginap di Kejaksaan Agung. Mahasiswa Trisakti mendesak Jaksa Agung, MA Rahman untuk memberi kepastian penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

#### **26 Mei 2004.**

Kapuspenkum Yahya Harahap dan Direktur Penanganan HAM I Ketut Murtika menerima aksi mahasiswa dan keluarga korban.

#### **23 September 2004**

Peringatan Semanggi II. Aksi longmarch dan tabur bunga di Atma Jaya dan Bundaran HI.

**26 September 2004**

Peringatan Semanggi II. Ziarah makam Yun Hap di Pondok Rangon.

**26 Oktober 2004**

Audiensi Kejaksaan Agung, mendesak Jaksa Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti Semanggi I dan II. Diterima oleh Soehandoyo (Kapuspenkum) dan I Ketut Murtika (Direktur Penanganan Berat HAM) yang menyatakan bahwa hambatan terletak pada persoalan teknis politis.

**8 November 2004**

Peringatan Semanggi I. Ziarah makam Sigit Prasetyo

**10 November 2004**

Peringatan Semanggi I. Ziarah makam BR Norma Irmawan.

Aksi ke Kejaksaan Agung, mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

**14 Desember 2004**

Komnas HAM menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali kasus ini disertai dokumen-dokumen hasil penyelidikan kepada DPR.

**29 Desember 2004**

Audiensi Kejaksaan Agung, mendesak Jaksa Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Diterima oleh Abdurahman Saleh (Jaksa Agung), Soehandoyo (Kapuspenkum) dan I Ketut Murtika (Direktur Penanganan Berat HAM). Jaksa Agung mengusulkan kepada korban untuk melakukan audiensi dengan DPR dan mengamendemen UU No. 26 tahun 2000 serta meminta pencabutan hasil Pansus DPR 2001 yang menyebutkan tidak adanya pelanggaran HAM berat kasus ini.

**25 Januari 2005**

Audiensi dengan DPR RI, mendesak DPR untuk mengambil peran berkaitan dengan terhambatnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus TSS. Diterima oleh Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuan, Arbaba Paperweka, Mahfudz MD, Trimedy Panjaitan. Komisi III sedang membuat tim penelitian atas kasus-kasus yang terhambat di Kejaksaan dan akan mencabut rekomendasi tersebut DPR tersebut.

**29 Januari 2005**

Audiensi dengan Kejaksaan Agung, mempertanyakan kinerja penyidik Trisakti Semanggi I dan II pada masa 100 hari pemerintahan SBY – JK. Diterima oleh I Ketut Murtika, Direktur Penanganan HAM berat yang menjelaskan bahwa dalam laporan program 100 harinya, Jaksa Agung hanya melaksanakan penelitian atas berkas Mei dan Trisakti, Semanggi I dan II dan mengembalikannya ke Komnas HAM dengan alasan belum lengkap (disertai petunjuk).

**7 Februari 2005**

Rapat Kerja DPR dan Jaksa Agung. Keluarga korban mendesak agar kedua belah pihak segera merealisasikan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus ini. termasuk menyelesaikan semua permasalahan hukum yang berkembang agar segera terbuka kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban.

**12 Mei 2005**

Peringatan Trisakti. Audiensi dengan Komisi III DPR RI.

**1 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Meminta F PKS untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS serta merekomendasikan kepada Presiden bagi pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Muzamil Yusuf dan Ustad Anwar yang menyatakan bahwa Fraksi PKS akan menyuarkan kasus TSS merupakan pelanggaran HAM Berat dan akan mengusulkan pencabutan rekomendasi Pansus DPR periode yang lalu. F PKS menjanjikan target pencabutan dilakukan pada bulan Juni.

**6 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta F PDIP untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PDIP merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima oleh Jakobus, Gayus Lumbuan dan Meliala Sembiring yang menyatakan bahwa PDIP akan tetap konsisten mendukung kasus TSS sebagai pelanggaran Berat HAM pada Pansus 2001 serta akan mencabut rekomendasi Pansus DPR periode lalu dan mendukung penyelesaian kasus TSS melalui pengadilan HAM.

**10 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meminta F PPP untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PPP dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima oleh Hafid Maksum, Hifin Syarkawi, Maysasak Johan dan Johan Mahya yang menyatakan bahwa F PPP mendukung pencabutan rekomendasi pansus DPR RI periode 1999 – 2004 untuk kasus TSS.

**10 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Golkar, meminta F Golkar untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F Golkar merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Akil Mukhtar yang menyetujui hasil laporan KPP HAM TSS dan akan membawa kasus ini ke Komisi III untuk mencabut rekomendasi pansus.

### **15 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Amanat Nasional, meminta F PAN untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PAN merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Hj. Azlaini Agus yang menerima korban menyatakan bahwa F PAN membutuhkan waktu untuk mengkaji kasus TSS dan akan membawa lewat mekanisme Pansus. Namun sorenya, pernyataan Azlaini Agus dianulir oleh Arbab yang menyatakan bahwa sikap F PAN mendukung pencabutan rekomendasi Pansus.

### **20 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Kesatuan Bangsa, yang meminta F PKB untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PKB dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Masduki Baidlowi, Drs. H. Saifullah Ma'sum dan Badriyah yang menerima korban menyatakan bahwa PKB tetap pada sikap awal, dengan menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS. F PKB akan membahas hal ini dalam rapat komisi dan forum lintas fraksi.

### **23 Juni 2005**

Audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat, yang meminta F Partai Demokrat untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Sutaji dan Ziki Wahab yang akan menyampaikan hal ini dalam rapat fraksi.

### **27 Juni 2005**

Fraksi F PDIP (109 kursi), F PPP (57 kursi), F PKB (52 kursi), F PAN (53 kursi) dan F PDS (13 kursi) telah menyerahkan pandangan fraksi ke Komisi III DPR RI, yang meminta rekomendasi DPR ditinjau ulang.

### **28 Juni 2006**

Keluarga korban Trisakti, Rektor Usakti dan Presma Usakti melakukan audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta proses penegakan kasus ini dilakukan secara cermat, bijak, adil dan terlepas dari persoalan politik. Presiden meminta rakyat untuk melihat kasus ini lebih jernih dan meletakkannya dalam konteks sejarah bangsa.

### **30 Juni 2005**

Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat paripurna DPR RI, 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari Fraksi-fraksi di DPR, yaitu F PKS, F PDIP dan F PDS.

### **5 Juli 2006**

Tidak ada pembahasan hasil kajian Komisi III dalam rapat paripurna, karena belum dibahas dalam rapat pimpinan.

**6 Juli 2005**

Rapat Pimpinan DPR gagal mengagendakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat. Padahal beberapa hari sebelumnya tingkat Komisi III DPR telah bersepakat untuk membatalkan rekomendasi tersebut.

**8 Juli 2005**

Aksi damai di depan gedung Nusantara II DPR RI sambil membentangkan spanduk, meminta anggota DPR untuk konsisten mencabut rekomendasi Pansus DPR RI serta membagi-bagikan selebaran dan press release kepada anggota DPR RI yang keluar atau memasuki rapat penutupan paripurna.

**12 Juli 2005**

Audiensi ke Komnas HAM, yang diterima oleh Abdul Hakim G Nusantara. Ia menyatakan bahwa dalam 4 kali Rapat Dengar Pendapat Umum Komnas HAM dengan Komisi III DPR, Komnas HAM meminta DPR untuk membuat tim untuk mengaudit kerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk kasus TSS, Mei dan Tanjung Priok. Namun hingga saat ini belum ada respo.

**31 Juli 2005**

Komisi III DPR RI (Hukum dan HAM) merekomendasikan agar kasus TSS dibuka lagi.

**15 Agustus 2005**

Keluarga Korban Trisakti menerima Penghargaan Pejuang Reformasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan Keputusan Presiden No. 057/TK/2005.

**18 Agustus 2005**

Diskusi Publik “Mengurai Benang Kusut kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II”. Pembicara terdiri dari I Ketut Murtika dan Situmeang dari Kejaksaan Agung, Benni K Harman dari DPR RI dan Usman Hamid dari KontraS.

**14 September 2005**

Audiensi dengan untuk, meminta DPR RI segera mencabut rekomendasi Pansus DPR RI terhadap kasus TSS melalui rapat paripurna dan meminta Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan Komnas HAM. Ketua DPR menyatakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 22 September 2005 akan mengagendakan kasus Trisakti dan Semanggi I dan II.

**18 september 2005**

Peringatan Semanggi II. Ziarah ke makam Yap Yun Hap di Pondok Rangun.

**20 September 2005**

Peringatan Semanggi II di FISIP UI dengan pembicara Papang Hidayat (Kontras) dan Ibu Ho Kim Ngo.

### **23 September 2005**

Peringatan Semanggi II. Diskusi Publik di Jaringan Relawan Kemanusiaan. Pembicara Fadjoel Rahman (Calon anggota KKR), Budiman Tanuredja (Kompas), dan Firman Jaya Daeli (PDIP).

### **24 September 2005**

Peringatan Semanggi II. Aksi massa dan happening art di HI ke Atmajaya. Aksi mendesak DPR agar tidak melakukan kebohongan publik, segera mencabut rekomendasi kasus TSS serta mendesak Presiden membentuk Kepres untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc.

### **11 Januari 2006**

Menyurati Ketua DPR HR Agung Laksono, mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan pembahasan Penuntasan Kasus TSS pada sidang Paripurna DPR tanggal 12 Januari 2006, guna pencabutan rekomendasi Pansus DPR TSS masa jabatan 1999-2004 serta meminta Jaksa Agung DPR RI segera melakukan penyidikan atas kasus TSS. Ketua DPR berjanji akan membahas kasus Trisakti di BAMUS pada hari 19 Januari 2006.

### **12 Januari 2006**

Menyebarkan statement dan DVD “Perjuangan Tanpa Akhir kepada” kepada wartawan dan anggota dewan di Gedung DPR pada masa pembukaan sidang ke III DPR. Meminta DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR masa jabatan 1999-2004 dan menuntut DPR membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian TSS. Dalam Rapat Paripurna, Nursyahbani Katjasungkana (Komisi III) dan Almuzammil Yusuf (F-PKS) mendesak Ketua DPR membuka lagi Kasus Trisakti dan Semanggi I-II. Ketua DPR Agung Laksono Berjanji Lagi akan bahas kasus TSS Trisakti di Bamus 19 Januari.

### **16 Januari 2006**

Menyurati ketua DPR RI Agung Laksono. mendesak Ketua DPR untuk memenuhi janjinya pada rapat Paripurna 12 Januari untuk mengagendakan kasus TSS pada rapat BAMUS 19 Januari 2006.

### **18 Januari 2006**

Menyurati pimpinan-pimpinan fraksi Golkar, F-PDI, F-PPP, F-Demokrat, F-Bintang Pelopor, F-PKB, F-PAN, F-PKS, F-Bintang Reformasi. mendesak pembahasan Agenda TSS pada rapat BAMUS dan pencabutan rekoemndasi Pansus DPR 2001.

Fahri Hamzah (Wakil ketua Fraksi PKS) : *F PKS tidak setuju kasus tragedi Trisakti Semanggi dibahas di DPR. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tak dilakukan secara parsial. Sebaiknya diselesaikan lewat KKR.*

Nadrah Izahari (Anggota Komisi Fraksi PDIP) : *Fraksi PDI perjuangan sudah memastikan sudah mengirim surat kepada BAMUS untuk mendukung komisi hukum.*

*Dengan adanya temuan pelanggaran HAM, wajar kalau kasus-kasus itu dibuka kembali  
Belum tahu rencana pembahasan kasus Trisakti dalam rapat BAMUS.*

*Lukman Hakiem (Sekretaris Fraksi PPP) : Belum tahu rencana pembahasan kasus  
Trisakti dalam rapat BAMUS. Mendukung pembahasan selama tujuannya murni untuk  
pengusutan. Kalau ada nuansa politik untuk menghantam institusi TNI, tak akan selesai.*

*Syarief Hasan (ketua F Partai Demokrat) : Fraksi partai demokrat belum akan ada  
pembahasan kasus TSS pada rapat BAMUS*

*Andi Matallata (Ketua Fraksi partai Golkar) : Mempersilahkan jika ada fraksi yang  
mengusulkan pembahasan kasus Trisakti, semanggi asalkan disetujui sidang paripurna*

### **19 Januari 2006**

Menyurati anggota BAMUS meminta masing-masing anggota BAMUS memasukan kasus TSS pada Agenda BAMUS 19 Januari 2006. karena Rapat BAMUS 19 Januari tidak membahas penyelesaian kasus TSS sebagaimana dijanjikan ketua DPR.

Siaran Pers meminta Ketua DPR Agung Laksono tidak mempermainkan kasus TSS dan empertanyakan konsistensi, komitmen, dan sikap segenap pimpinan serta para anggota DPR terkait penyelesaian kasus Trisakti, dan Semanggi I-II, yang hampir sewindu terkatung-katung

### **20 Januari 2006**

Siaran pers berisi pernyataan :-kekecewaan terhadap batalnya BAMUS 19/1 yang tidak membahas TSS, dan kegagalan rapat Paripurna 2006 membahas TSS. Serta kegagalan DPR menyetujui hasil kajian komisi III DPR dan mengingatkan ketua DPR Agung Laksono untuk tidak mempermainkan masalah ini dengan alasan tehnis prosedural

### **27 Januari 2006**

Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak perlu ada pembahasan lagi terhadap tragedi yang terjadi tahun 1998. Rapat pimpinan menyatakan bahwa belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR periode 1999-2004 Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak etis membuka kasus yang sudah diputuskan DPR periode 1999-2004.

### **07 Februari 2006**

Menyurati ketua komisi III Trimedya Panjaitan, dan Wakil ketua komisi III M. Akil Mochtar, H. Djuhad Mahdja, Mulfahri Harahap, Almuzammil Yusuf. meminta mereka mendesak ketua DPR, Sekjen DPR untuk membahas kasus TSS, perihal pencabutan rekomendasi Pansus DPR pada rapat BAMUS 9 Februari 2006

Menyurati komisi III, terkait RDP komisi III dengan Kejagung 20 Februari, meminta komisi III menanyakan penuntasan kasus TSS yang terhenti di Kejaksaan Agung

### **12 Februari 2006**

Rapat BAMUS berlangsung tertutup, pimpinan DPR menolak mengagendakan kasus TSS. Pimpinan DPR menilai membatalkan rekomendasi DPR periode 1999-2004 tidak etis. Wakil ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno dari fraksi PDI-P Tardjo menyepakati untuk tidak membatalkan rekomendasi DPR yang lalu.

### **20 Februari 2006**

Komisi III tidak membahas penuntasan kasus pelanggaran HAM TSS .

### **21 Februari 2006**

Audiensi dengan Komisi III, diterima Trimedy Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nusyahbani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asmara, Panda Nabababan dll mendesak penolakan putusan RAPIM DPR yang memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak bisa dibatalkan.

Panda Nababan menyatakan, 1).tidak ada mekanisme pimpinan DPR memutuskan sesuatu. Mekanismenya dari BAMUS lalu ke Paripurna. 2). Pansus 2001 kental dengan kepentingan karena banyak fraksi TNI, 7 fraksi tidak menyetujui adanya pelanggaran HAM berat sedangkan yang menyetujui hanya 3 fraksi. 3).BAMUS 23 Januari akan mengagendakan kasus TSS

Nusyahbani Katjansungkana menyatakan; 1). Tatatertib tentang UU 26/2000 tidak dilakukan dengan tertib. 2). Meminta terus dilakukan pemantaun terhadap BAMUS. 3).Kejagung mengembalikan penuntasan kasus TSS kepada DPR. 4).Ada perbedaan prosedur pemeriksaan saksi antara Komnas HAM dan Kejagung- Kejagung harus dingatkan untuk tidak tergantung rekomendasi DPR. 5). Mengusulkan agenda Komisi III untuk menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus TSS.

Trimedy Panjaitan menyatakan; 1) akan terus mengusahakan TSS dibawa ke Paripurn. 2). pada 23 februari akan bertemu ketua DPR untuk membicarakan TSS- meminta KontraS dan keluarga korban melakukan loby fraksi, untukantisipasi kesolidan komisi III dan fraksi agar tidak di mentahkan pada Paripurna.

### **23 Februari**

Aksi di depan ruang rapat BAMUS DPR (Badan Musyawarah DPR), menuntut rapat BAMUS 23 Februari mengagendakan pembahasan kasus TSS untuk dibawa ke sidang Paripurna, mendesak DPR segera mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Hasil Rapat BAMUS merekomendasikan komisi III untuk kembali membuka kasus TSS

### **21 Maret 2006**

Menyurati 58 Anggota Komisi III DPR RI, meminta kepada seluruh anggota Komisi III untuk:1). Segera mengkaji kembali kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi, guna pencabutan rekomendasi Keputusan Pansus DPR (1999-2004) yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. 2). Segera

membawa hasil peninjauan Komisi III ke Sidang Paripurna, untuk selanjutnya merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad Hoc kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

### **25-26 Maret 2006**

Menyebarkan sticker TSS “Jangan Diam” dan Sticker “Jangan Temani Pelanggaran HAM” di Dago dan lapangan Gasibu Bandung bersama JPK, AKRA.

### **28 Maret-25 April 2006**

Roadshow TSS di Bandung Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian”; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Selasa 28 Maret 2006, Kampus Universitas Pasundan (UNPAS), Selasa 4 April 2006, Kampus Universitas Langlang Buana (UNLA), Selasa 11 April 2006, Kampus Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Selasa 18 April 2006, Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Selasa 25 April 2006.

### **29 Maret 2006- 30 maret**

Roadshow TSS di Cirebon Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, Pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. Di kampus Unsuagati dan halaman DPRD Cirebon.

### **4 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berisi permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan kasus TSS, namun tidak direspon

### **8 Mei 2006**

Roadshow TSS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bentuk: 1. Pameran Foto TSS. 2. Diskusi Publik Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian”, Penyebaran Poster, sticker TSS “Jangan Diam” dan pengisian kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk DPR dan Presiden, dan orasi elemen gerakan mahasiswa.

### **12 Mei 2006**

Aksi ke DPR menuntut DPR mencabut rekomendasi Pansus 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada kasus TSS

### **16 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk untuk mempertanyakan perkembangan kasus TSS dan menyerahkan kartupos dukungan penuntasan kasus, namun tidak direspon

### **18 Mei 2006**

Peringatan Trisakti. Aksi ke DPR dan penyerahan postcard ke DPR. Permohonan tidak ditanggapi. Aksi dan Audiensi ke Istana di terima Jubir Presiden Andi Malarangeng, menyerahkan 1.666 kartupos dukungan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.. Isi kartupos ditujukan kepada ketua DPR untuk segera mencabut rekomendasi keputusan Pansus DPR 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus TSS, dan segera merekomendasikan presiden agar membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Andi A Malarangeng, selaku Jubir Presiden menyatakan:1. berjanji presiden SBY senantiasa akan terus melakukan perbaikan di bidang HAM.

Panggung Bersama “Sewindu Reformasi”. Diskusi publik “Pengadilan Suharto” dengan pembicara Hendardi dan Fadjroel Rahman. Pembacaan Resolusi korban Pelanggaran HAM oleh seluruh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM

### **30 Mei 2006**

Menyurati ketua Komisi III Trimedya Panjaitan; permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS oleh komisi III. Komisi III tidak bisa memenuhi dengan alasan masih harus menunggu hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR

Menyurati Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk menyerahkan 1762 kartupos dukungan penuntasan kasus TSS yang berisi desakan pencabutan rekomendasi keputusan Pansus DPR (1999-2004) dan segera merekomendasikan Presiden agar membentuk pengadilan HAM ad hoc. Namun tidak direspon

### **30 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI, berisi permohonan audiensi dengan komisi III untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS, namun tidak direspon

### **14 Juni 2006**

Rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Komisi III DPR diminta melakukan pengkajian ulang hasil Pansus DPR 1999-2004 untuk selanjutnya dibawa ke Bamus untuk diagendakan

### **9 Juni 2006**

Menyurati Ketua DPR RI Agung Laksono, berisi permohonan audiensi dan penyerahan 1672 kartupos TSS yang ditujukan untuk ketua DPR (hasil roadshow TSS), namun tidak direspon.

### **20 Juni 2006**

Rapat BAMUS DPR. Rapat BAMUS kembali menyerahkan kasus TSS kepada Komisi III untuk dilakukan pengkajian.

#### **4 Juli 2006**

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, berisi permohonan audiensi dengan ketua Komisi III, untuk membicarakan penugasan BAMUS DPR RI kepada komisi III perihal penyelesain kasus TSS, namun tidak direspon

#### **13 Juli 2006**

Mengirimkan Nota Protes Terbuka untuk Kasus TSS ke Ketua DPR R HR. Agung Laksono, Anggota Komisi III DPR RI., Anggota BAMUS DPR RI., Anggota Fraksi-Fraksi DPR RI., Media massa cetak dan elektronik. Berisi protes terhadap kinerja DPR yang sengaja memperlambat dan mempersulit pencabutan rekomendasi pansus 2001. dengan mengeluarkan keputusan menolak mencabut rekomendasi pansus 2001 oleh ketua DPR, , dan pengulangan penugasan Komisi III untuk mengkaji TSS, serta tidak adanya tindaklanjut terhadap hasil kajian Komisi III.

#### **21 Juli**

Siaran Pers terkait politisasi kasus TSS di DPR. dengan thema “MENCEMASKAN POLITISASI DPR DALAM KASUS TRISAKTI-SEMANGGI” *pertama*, tentang adanya saling lempar mandat dalam upaya pencabutan rekomendasi tersebut antara Komisi III dengan BAMUS (Badan Musyawarah) DPR. sejak Komisi III DPR RI menyepakati pembatalan rekomendasi tersebut (30/06/05). *Kedua*, tentang terjadinya pengurangan (reduksi) substansi tentang apa yang harus dilakukan. Awalnya "sepakat untuk membatalkan", kemudian "mempertajam urgensi kasus TSS dibuka kembali" dan terakhir "mendalami dan menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM". *Ketiga*, tentang pernyataan sepihak dari para pimpinan DPR RI tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang tersedia di DPR (27/01/06). pernyataan penolakan pencabutan rekomendasi hanya didasari oleh alasan etis semata. Serta terkait penolakan Pimpinan DPR dan Komisi III untuk menerima delegasi keluarga korban dan para mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyerahkan Kartu Pos dukungan penuntasan kasus TSS.

#### **21 Juli 2006**

Pertemuan korban, untuk silaturahmi dan membicarakan strategi perumusan advokasi keluarga korban untuk mendorong pencabutan rekomendasi pansus 2001, dengan cara mendatangi fraksi-fraksi dan meminta komitmen individu-individu di institusi terkait, membangun jaringan mahasiswa dan kelompok potensial lainnya.

#### **18 September 2006**

Menyurati Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan, berisi permohonan audiensi untuk mempertanyakan perkembangan kasus Trisakti Semanggi. Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa berkas yang dikembalikan oleh BAMUS tidak merekomendasikan pembentukan tim di Komisi III.

#### **20 september 2006**

Talkshow di 68 H, dalam acara “perempuan” membicarakan posisi kasus, advokasi kasus dan harapan keluarga korban.

### **21 September 2006**

Diadakan pertemuan untuk membicarakan peringatan semanggi II, untuk kegiatan Napak Tilas, Pemutaran Film dan Launching Buku, Breafing Media, Audiensi Komisi III dan Ziarah Kubur.

### **22 september 2006**

Memperingati tujuh tahun peristiwa semanggi II Napak tilas ekitar 150 orang dari APKAS (GMNK, GMNI UKI, GMNI UBK, Kompak, IKOHI, JRK, , LMND; dan FAMSI) melakukan napak tilas dari Rumah Sakit Jakarta sampai Atmajaya, melakukan Orasi, Renungan, tabur bunga, menyalakan lilin, pembacaan doa, dan pembagian selebaran.

Melakukan aksi ke DPR menuntut DPR Mencabut Rekomendasi Pansus 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus TSS, DPR merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus TSS.

namun tidak ada pihak DPR atau komisi III yang mau menerima

### **23 september 2006**

Masih dalam rangkaian ziarah kubur, dilakukan Ziarah kubur ke makam Yunhap di Pemakaman Pondok Rangon, bersama korban Semanggi, korban Mei, GMNI UKI, GMNK, Akkra, korban 65. dan Pemutaran film peristiwa Semanggi “saksi mata” TV 7, serta Launching Buku “Melawan pengingkaran” di KontraS.

Diskusi dengan thema “Delapan tahun TSS dan Gerakan Mahasiswa” bersama Aktivistis 98, BEM Sejabotabek, Kampus korban, pers dan gerakan mahasiswa

Dengan pembicara Pembicara: Hok Kim Ngo (korban semanggi II), Bona (AKKRA, ex; PAMRED), Sarbini (FKSMJ, aktivis 98), Jhon Muhammad (TPK 12 Mei), Kokom (pelaku sejarah semanggi II, teman dekat Yunhap), Usman Hamid (KontraS). Ginting (FAMSI Atmajaya), Mufti Ali (UI), Alif (Pers: radio 68 H)

### **3 Oktober 2006**

Sarasehan dan Buka bersama korban kekerasan dan Pelanggaran HAM. acara diisi dengan diskusi “Membedah Fakta Sejarah Korban” dengan pembicara Asvi Warwan Adam (Sejarawan), Zoemrotin K Soesilo (Wakil Ketua Komnas HAM), Fadjoel Rahman (Calon anggota KKR; korban Penculikan). Sarasehan menyikapi terbitnya buku-buku kontroversial seputar sejarah masa lalu, seperti buku Detik-detik yang Menentukan, Politik Huru Hara Mei 1998, Bersaksi di Tengah Badai dan buku lain yang ditulis oleh para aparat keamanan atau pihak yang berkuasa. Sementara berbagai cerita yang terserak dan menjadi fakta peristiwa versi korban tidak punya tempat yang cukup dalam wacana sejarah Indonesia.

## **2 November 2006**

Menyurati pimpinan DPR, Agung Laksono, berisi permohonan audiensi untuk menagih tindaklanjut hasil kajian komisi III dan hasil rekomendas rapat BAMUS.

Konsolidasi dengan keluarga korban, FAMRED, IKOHI, GMNK, LPR KROB 65. membicarakan Hambatan Penuntasan TSS dan langkah strategis dan Politisasi TSS di DPR.

## **6 November 2006**

Konsolidasi peringatan Semanggi I, dengan GMNI UKI, IKOHI, RPM, KOMPAK, HikmahBudhi, orang tua korban, Akkra, FAMRED JAMMOER, BEM USAKTI, STN, GMNI UBK, SAN, KOMPAK, LSADI, GMNK. Merumuskan Agenda jaringan TSS Jangka Pendek dan materi Peringatan Semanggi I

## **8 November 2006**

Rapat teklap kegiatan peringatan semanggi I, bersama GMNI UKI, RPM, LPR.KROB, IKOHI, LS ADI, Kompak, FIS BEM Trisakti, FAMRED, LMND IISIP, GMNI UBK, GMNK, HMI Trisakti.

## **11 November 2006**

Mengisi Talkshow di radio 68H. Diwakili ibu Sumarsih sebagai perwakilan keluarga korban.

## **13 November 2006**

Memperingati tujuh tahun Semanggi II bersama jaringan penuntasan kasus TSS; eluarga korban, BEM Trisakti, FIS, FAMRED, FAMS I Atmajaya, GMNI UKI, GMNI UBK, GMNK, Hikmahbudhi, HMI Trisakti, IKOHI, JRK, KOMPAK, KontraS, LS ADI, LMND IISIP, LPR.KROB, STN, RPM. Dengan melakukan Pemasangan spanduk TDD 120 meter, pameran Foto2 TSS di Atmajaya, dan Pembagian selebaran TSS, Ziarah Ke Makam sigit (TPU Tn. Kusir), Tabur Bunga, Mimbar Bebas di Atmajaya, Mengisi acara Repbulik Mimpi di Metro TV untuk thema kasus TSS. Misa di rumah ibu Sumarsih, Menjadi gisi njadi salahsatu nara sumber di acara sarapan pagi di radio 68h diwakilkan Indria Fernida sebagai narasumber dan Menjadi salahsatu nara sumber di Headline FM, Ibu Sumarsih selaku perwakilan keluarga korban.

## **14 November 2006**

Masih dalam rangkaian peringatan Semanggi II, melakukan Aksi ke DPR, Mahkamah Agung dan Istana bersama JARINGAN PENUNTASAN KASUS TRISAKTI, SEMANGGI". Terdiri dari : Keluarga korban, BEM Trisakti, FIS, FAMRED, FAMS I Atmajaya, GMNI UKI, GMNI UBK, GMNK, Hikmahbudhi, HMI Trisakti, IKOHI, JRK, KOMPAK, KontraS, LS ADI, LMND IISIP, LPR.KROB, STN, RPM. untuk menekan dan menagih janji DPR untuk mencabut Rekomendasi Pansus 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM pada kasus TSS, Meminta MA mengeluarkan Fatwa dalam menenuntaskan kasus TSS yang terhambat oleh keputusan politis DPR, dan meminta Presiden untuk menggunakan kebijakannya berupa keppres pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Dan meminta Kejagung mengusut tuntas kasus TSS.

**27 November 2006**

Konsolidasi jaringan bersama GMNI UKI, KPMSI, Format Sidoarjo, YPKP 65, LS-ADI, RPM, Kompak, LS-Adi. Membicarakan metode penguatan jaringan TSS dan tidak lanjut komitmen jaringan TSS. Disepakati agenda diskusi bersama 2 minggu sekali, dan penyikapan konkrit dari hasil diskusi, mengadakan pertemuan ke kampus-kampus, min. 1x sebulan. Pembuatan media buletin/atau selebaran bersama secara rutin.

**29 November 2006**

Diskusi terbuka “Komitmen HAM Parpol di DPR (Macetnya kasus TSS). Pukul 14.00 di KontraS, pembicara: Gayus Lumbuun (Komisi III), Moefi Ali (Komafil UI), Jhon (UNIIA), Toni (SMI). Moderator faruq Arnas (Indopos), Dihadiri sekitar 100 orang.

**02 Desember 2006**

Rapat tindak lanjut hasil diskusi 29/11. bersama Kompak, RPM, GMNI UKI, KPMSI, Trisakti, YAI, YPKP 65. korban Mei, IKOHI. Disepakati aksi ke Kejagung 5/11, grand Issue “Kejagung Laundry kasus, Turunkan Jaka Agung jika tidak mau menyidik kasus TSS, Culik, Mei dan kasus2 pel. HAM.

**04 Desember 2006**

Rapat Teklap aksi ke Kejagung bersama Famred Jammoer, GMNI UKI, Kompak, RPM, KPMSI, FPPI, Trisakti, FAM YAI, grand Issue “Kejagung Laundry kasus”

**05 Desember 2006**

Aksi ke kejagung bersama jaringan penuntasan kasus TSS (Kompak, GMNI UKI, RPM, Trisakti, Famred Jammoer Moestopo, Pawang/Ciliwung, kel. korban) menuntut kejagung Menyidik kasus pel HAM (TSS, Penculikan, dan Mei)

RDPU Komisi III dan Kejaksaan Agung RI, namun tidak membahas kasus TSS. Hanya membahas kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998.

**29 Januari 2007**

Raker Komisi III dan Kejaksaan Agung RI salah satu pokok bahasan adalah tindak lanjut kasus – kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam pertemuan ini, Jaksa Agung menyatakan sebelum dilakukan penyidikan, untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.

**30 Januari 2007**

Siaran pers bersama yang diikuti oleh IKOHI, FKMM, Paguyuban Mei 1998 dan IKKAPRI untuk menyikapi polemik penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat .

**9 Februari 2007**

Rapat kerja Khusus antara Komisi III dan Kejaksaan Agung RI, salah satu tema bahasannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, Jaksa Agung tetap tidak merubah argumentasi sebelumnya.

**12 Februari 2007**

KontraS mengirim surat masukan untuk rapat internal Komisi III menanggapi penolakan Jaksa Agung melakukan penyidikan

KontraS bersama keluarga korban menggelar siaran pers bersama dengan tema “*Komisi III DPR RI Harus Paksa Jaksa Agung melakukan Penyidikan*”

**5 maret 2007**

Rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III dan Kejaksaan Agung RI. Dalam rapat ini Kejaksaan Agung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Komisi III juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang.

**13 Maret 2007**

Aksi bersama oleh Presma Usakti, Korban 65, KontraS, FAMSI, LMND dan keluarga korban didepan halaman gedung nusantara I DPR RI mendesak DPR mencabut rekomendasi Pansus 2001 dan menggendakan kasus TSS pada sidang paripurna

Badan Mufarah DPR menggelar sidang untuk menyeleksi agenda yang akan dibawa ke sidang Paripurna. Hasilnya, 6 fraksi menolak yang terdiri dari F Partai Golkar, F PPP, F PKS, F Partai Demokrat, F Bintang Reformasi, dan F BPD. Selanjutnya hanya 4 fraksi yang setuju dibawa ke paripurna diantaranya FPDIP, FPKB, FPAN dan FPDS.

**14 Maret 2007**

KontraS menggelar siaran pers bersama keluarga korban menyikapi hasil keputusan Badan Musyawarah DPR I

**6 Mei 2007**

Bekerjasama dengan PP PMKRI menggelar konsolidasi pemuda dan mahasiswa yang dihadiri SMI, LMND, Kompak, FPPI, FMN, GMKI, GMNI, Pawang, GMNK, LS ADI, YPKP, REPDEM, dll

**10 Mei 2007**

Siaran pers bersama keluarga korban dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penindasan (ARAP) sosialisai rangkaian peringatan Mei.

**11 mei 2007**

Menggelar aksi didepan gedung DPR RI bersama SMI, LMND, Kompak, FPPI, FMN, GMKI, GMNI, Pawang, GMNK, LS ADI, YPKP, dll yang tergabung dalam ARAP

**12 Mei 2007**

Malam refleksi “Penuntasan kasus pelanggaran HAM: Mei dan TSS” di gedung PP PMKRI

**13 Mei 2007**

Memperingati tragedi Mei 1998 dengan tabur bunga di Mall Klender, pembagian 2000 sticker Mei dan TSS di Monas, tabur Bunga di depan Istana, jalan santai kampanye kasus Istana-Bunderan HI

**2 Juli 2007**

KontraS mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI mempertanyakan kelanjutan kasus TSS I&II, Mei 98 dan Penghilangan paksa

**12 Juli 2007**

KontraS menggelar diskusi dengan Komisioner Komnas HAM yang baru diantaranya Ridha Saleh, Yosef Adi Prasetyo, Safrudin Simeuleu, Kabul Supriyadie. Sementara dari korban yang hadir diantaranya korban 1965, TSS, Mei, pasar Barito, Bojong TPST, Tanjung Priok.

**17 Juli 2007**

KontraS bersama mahasiswa melakukan kunjungan ke rumah Ibu Martini (Ibunda Sigit Prasetyo) di Tanah Kusir

**19 September 2007**

KontraS bersama mahasiswa melakukan kunjungan ke rumah Ibu Ho Kim Ngo (Ibunda Yap Yun Hap)

**22 September 2007**

Peringatan Semanggi II dengan menggelar aksi dan tabur bunga di depan RS Jakarta dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama di rumah keluarga Yap Yun Hap

**23 September 2007**

KontraS bersama pemuda, mahasiswa dan keluarga korban melakukan ziarah ke kuburan Yap Yun Hap di pondok Rangon Jakarta Timur

**11 Januari 2007**

Kunjungan ke rumah ibu Ho Kim Ngo (Ibunda Yap Yun Hap) dan Ibu Karsiah (Ibunda Hendriawan Sie) sosialisasi draft KKR yang baru dan mendiskusikan perkembangan kasus TSS

**13 Januari 2008**

Kunjungan kerumah pak Cece Sarweli (Orang Tua Engkus Kusnadi) untuk sosialisasi draft KKR dan perkembangan kasus TSS

**17 Januari 2008**

Diskusi korban di KontraS untuk membahas draft KKR dan menentukan sikap korban.

**22 Januari 2008**

KontraS mengirim surat ke Kejaksaan Agung RI untuk meminta penjelasan perkembangan kasus TSS, Mei 98 dan Orang Hilang, namun tidak ada jawaban.

**27 Januari 2008**

KontraS menggelar siaran pers bersama keluarga korban merespon meninggalnya mantan preiden Soeharto. Keluarga korban mendesak pemerintah untuk tidak mudah memaarkan Soeharto tanpa kejelasan status hukumnya terlebih dahulu.

**28 Januari 2008**

Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) bersama keluarga korban menggelar diskusi merespon meninggalnya mantan Presiden Soeharto

**19 Februari 2008**

KontraS menggelar siaran pers bersama dengan keluarga korban, IKOHI, PRESMA Univ Trisakti, KontraS, TPK 12 Mei, FAMSI ATMAJAYA, RPM UKI. Siaran pers ini menyerukan kepada DPR RI untuk bertanggungjawab atas penundaan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

**21 Februari 2008**

KontraS bersama keluarga korban menggelar siaran pers tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi yang Menggugurkan Kata-kata “dugaan” pada Penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM.

**24 Februari 2008**

Pertemuan lintas korban (65, Priok, Mei 98 dan Penghilangan Paksa)

**25 Februari 2008**

KontraS mengirim surat kepada Jaksa Agung terkait putusan MK tentang penjelasan pasal 43 ayat 2 UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, namun tidak memperoleh jawaban.

**5 Maret 2008**

Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pasca putusan MK tentang Penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung setuju dengan keputusan MK dan mengenai penundaan selama ini hanya terkait syarat formil dan materil.

**5 Maret 2008**

KontraS bersama keluarga korban menggelar aksi dan pembagian selebaran di depan gedung nusantara II DPR RI bersama senat mahasiswa Unika Atmajaya terkait raker Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI

**11 Maret 2008**

KontraS menggelar diskusi publik “masa depan kasus Trisakti, Semanggi I&II pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor

26 Tahun 2000". Narasumber yang hadir Gayus Lumbun ( F PDIP), Irmanputra Sidin (Mantan Staf Ahli MK), Kabul Supriyadi ( Komnas HAM) dan Usman Hamid (KontraS).

#### **14 Maret 2008**

KontraS menggelar siaran pers bersama mendesak pencopotan Jampidsus Kiemas Yahya Rahman. Turut hadir diantaranya PRESMA UNIVERSITAS TRISAKTI, BEM FAKULTAS HUKUM ATMAJAYA, FAMSI ATMAJAYA, PP PMKRI, GMNI UKI, GMNI UBK, FAM UI, HAMAS Universitas Nasional, Keluarga Korban Tragedi Mei 1998, Keluarga Korban TSS I&II, TPK 12 Mei 1998, dan IKOHI

#### **10 April 2008**

KontraS menggelar diskusi publik di aula Mahkamah Konstitusi dengan tema "*Prospek Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu pasca Dukungan Presiden RI*". Narasumber yang hadir Azis Samsudin (F Golkar), Suropto (F PKS), Indra J Piliang (Pengamat Politik CSIS) dan Usman Hamid (KontraS).

#### **17 April 2008**

Aksi ke Kejaksaan Agung RI meminta penjelasan Jaksa Agung atas pengembalian 4 berkas kasus ke Komnas HAM. Aksi digelar bersama dengan JSKK, KontraS, Gmni UKI. IKOHI, Gmni UBK, FKMM Mei 1998, Paguyuban Mei 1998, Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Famsi Atmajaya, Keluarga korban Wasior-Wamena

#### **23 April 2008**

Audiensi dengan Kejaksaan Agung RI bersama Elsam, Romo Sandyawan, PBHI (Maya), Bu Sumarsih dan Pak Arif (Semanggi I), keluarga korban Mei 98. Dalam pertemuan tersebut pihak Jaksa Agung diwakili oleh Muchtar Arifin (Wakil Jaksa Agung). Hasil dari pertemuan ini tidak ada perubahan sikap dari Kejaksaan Agung, argumentasinya tetap bahwa penyidikan hanya bisa dilakukan setelah terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

#### **29 April 2008**

KontraS menggelar diskusi publik refleksi 10 tahun reformasi dengan narasumber Savik (FPPI), Robertus Robert (P2D)

#### **21 Mei 2008**

KontraS bekerja sama dengan Jaringan Penuntasan Kasus Bandung (JPK) menggelar diskusi publik 10 tahun reformasi di Bandung. Narasumber yang hadir Ibu Sumarsih (Ibunda Wawan) dan Edwin Partogi (KontraS)

**23 Mei 2008**

KontraS bekerja sama dengan Jaringan Penuntasan Kasus Bandung (JPK) menggelar diskusi publik 10 tahun reformasi di Bandung. Narasumber yang hadir Ibu Karsiah (Ibunda Hendriawan Sie ) dan Yati Andriyani (KontraS)

**30 Mei 2008**

KontraS bekerja sama dengan Jaringan Penuntasan Kasus Bandung (JPK) menggelar diskusi publik 10 tahun reformasi di Bandung. Narasumber yang hadir Bapak Cece Sarweli (orang tua Engkus Kusnadi) dan Chrisbiantoro (KontraS)

**1 Juli 2008**

KontraS bersama keluarga korban diterima oleh Komisi III DPR RI. komisi III menyampaikan akan menindaklanjuti pengaduan keluarga korban dengan mengagendakan kembali pembahasan kasus –kasus HAM di sidang Komisi

**23 September 2008**

KontraS menggelar rangkaian peringatan kasus pelanggaran HAM berat di bulan September yang dikemas dengan September bulan HAM.

**3 November 2008**

KontraS bersama Komite 13 November menggelar Road Show ke media Detik Com dan Ok Zone.

**4 November 2008**

KontraS bersama Komite 13 November menggelar Road Show ke Tri Jaya dan Green Radio

**9 November 2008**

KontraS bersama mahasiswa dan pemuda, keluarga korban serta komite 13 November menggelar konvoi memperingati 10 tahun peristiwa semanggi I

**10 Februari 2009**

KontraS bersama keluarga korban Trisakti, Semanggi I&II, Orang Hilang, Wasior Wamena dan tragedi Mei 1998 serta IKOHI melakukan audiensi ke Komisi Kejaksaan untuk mendesak peran komisi kejaksaan melakukan pemantauan dan kajian kinerja Kejaksaan Agung terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

**17 – 20 Maret 2009**

KontraS bersama perwakilan korban pelanggaran HAM dari 24 propinsi menggelar kongres pejuang HAM di Wisma Makara UI Depok.

**2 April 2009**

KontraS bersama keluarga korban dan jaringan pemuda, mahasiswa menggelar konvoi kendaraan dengan tujuan kantor KPU, DPR RI dan Istana Negara untuk mensosialisasikan jangan pilih caleg pelanggaran HAM.

### **15 – 21 April 2009**

Dua orang Ibu dari anggota Plaza De Mayo di Argentina (aksi ibu – ibu di depan plaza de mayo setiap satu minggu sekali untuk mendesak pemerintah bertanggungjawab atas kasus penghilangan paksa yang menimpa putra – putri mereka sejak rezim militer berkuasa dari tahun 1970 – an. Mereka hadir ke Indonesia untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban melawan impunitas.

### **30 April 2009**

KontraS bersama keluarga korban, IKOHI, Romo Sandyawan audiensi ke DPP PDIP. Diterima oleh Pramono Anung (Sekjen). Keluarga korban menyampaikan agar DPP PDIP tidak beraliansi dengan partai politik pelanggar HAM dan menolak capres serta cawapres pelanggar HAM

### **3 Mei 2009**

KontraS bersama keluarga korban audiensi ke DPP PPP untuk mendesak partai ini tidak berkoalisi dengan partai politik pelanggar HAM dan tidak mengajukan capres serta cawapres pelanggar HAM

### **4 Mei 2009**

KontraS bersama keluarga korban melakukan audiensi ke Komnas HAM mendesak agar Komnas HAM melakukan respon terkait rencana pencalonan beberapa orang yang terindikasi melanggar HAM sebagai capres dan cawapres.

KontraS bersama keluarga korban melakukan audiensi ke DPP partai Demokrat untuk menegaskan agenda penegakan HAM dan memastikan HAM tetap menjadi prioritas dalam kerja pemerintahan berikutnya.

### **6 – 8 Mei 2009**

Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar diskusi publik dan lomba debat HAM sebagai rangkaian peringatan 11 tahun peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998.

### **7 Mei 2009**

KontraS bersama keluarga korban melakukan audiensi ke DPP PKS dan DPP PKB untuk memastikan agenda HAM tetap menjadi prioritas dalam masa pemerintahan berikutnya dan menolak capres dan cawapres pelanggar HAM

### **11 Mei 2009**

KontraS bersama keluarga korban, pemuda dan mahasiswa menggelar pengadilan Mei untuk mengadili keterlibatan Prabowo dan Wiranto dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, diantaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II, tragedi Mei 1998 dan Penculikan serta Penghilangan paksa aktivis 1998.